

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi yang mulai membuka diri untuk modernisasi budayanya untuk mengubah pandangan dunia terhadap dirinya, perubahan demi perubahan dilakukan oleh Raja Salman yang didukung oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman dalam 5 tahun terakhir ini. Visi 2030 mungkin menjadi kunci dari reformasi yang dilakukan oleh kerajaan yang dikenal konservatif ini. Kesan konservatif inilah yang akan dihilangkan oleh Arab Saudi melalui Visi 2030. Visi ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan wisata.

Motor perubahan datang dari Pangeran Salman. Sosok pangeran berusia 32 tahun itu, menyuarakan bahwa Arab Saudi adalah negara yang moderat. Dirinya menegaskan akan membawa Arab Saudi kembali sebagai negara yang lebih terbuka pada perbedaan dan memberantas korupsi. Detail awal disuguhkan oleh Pangeran Mohammad bin Salman pada 25 April 2016. Dewan Menteri menugaskan Dewan Urusan Ekonomi dan Perkembangan untuk melakukan identifikasi serta memonitor mekanisme implementasi krusial dari Visi 2030 Arab Saudi. Minyak mentah penyumbang 30 hingga 40 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari Arab Saudi. Tetapi proposi ekonominya juga tergantung pada distribusi minyak. Mencoba mengurangi ketergantungan akan minyak sudah menjadi tujuan utama dari pemerintah sejak era 1970. Tetapi implementasinya sangat tidak stabil dan lagi-lagi tergantung pada harga minyak dunia. (Sianturi N. , 2017)

Adapun Visi 2030 yang disampaikan oleh Pangeran Mohammad bin Salman memiliki tiga pilar utama. Pilar pertama adalah menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Kedua, determinasi sebagai kekuatan investasi global dan Ketiga, mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni, Asia, Eropa dan Afrika. Visi ini bukannya tanpa tujuan yang jelas. Kerajaan Arab Saudi di bawah kekuasaan Raja Salman melalui Visi 2030 jelas memiliki tujuan yang mereka incar. (Hidriyah, 2016)

Beberapa tujuan itu seperti dikutip dari situs Vision2030 antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor non-minyak dari 163 miliar riyal menjadi 1 triliun riyal.
2. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40 persen hingga 65 persen dalam PDB.
3. Investasi asing turut menjadi perhatian. Pemerintah Arab Saudi menargetkan peningkatan investasi langsung asing dari 3,8 persen menjadi 5,7 persen.
4. Pemberdayaan perempuan juga diperhatikan. Dengan reformasi ini, Arab Saudi menginginkan peranan perempuan dalam lingkungan dari 22 persen menjadi 30 persen.
5. Meningkatkan lokalisasi sektor gas dan minyak dari 40 persen menjadi 75 persen turut menjadi perhatian utama. (Government of Saudi Arabia, 2016)

Saudi Vision 2030 memiliki 3 pilar penting didalamnya yaitu, *A Vibrant Society, Thriving Economy, dan An Ambition Nation. A Vibrant Society* atau masyarakat yang dinamis dimaksudkan disini adalah Arab Saudi ingin memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini didasarkan bahwa kekayaan suatu negara sesungguhnya tidak hanya terletak pada sumber daya alam, namun kekayaan yang sebenarnya dimiliki suatu negara terletak pada sumberdaya manusia. Keberadaan Arab Saudi sebagai jantung dari dunia Arab dan Islam juga mendorong pemerintah kerajaan untuk memperkuat masyarakat

Arab Saudi untuk tetap berada pada prinsip-prinsip keIslaman yang menjadi identitas nasional mereka yang telah mengakar dan harus diperkuat. (Albassam, 2011)

Reformasi yang dilakukan Arab Saudi yang ditunjukkan dengan diputuskannya program ‘Saudi Vision 2030’ pada 2016 lalu membawa perubahan besar bagi Arab Saudi mulai dari kebijakan-kebijakannya pada sektor domestik hingga hubungannya dengan dunia internasional. Hal tersebut dikarenakan Arab Saudi merupakan negara pemproduksi dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar keenam di dunia (Energi Information Administration (EIA), 2004). Serta merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari Ekonomi Utama G-20 (Wynbrandt, 2004).

Ekonomi Utama G 20 adalah kelompok negara dengan perekonomian besar dunia. Minyak bumi yang dimilikinya membantu perekonomian Arab Saudi, dan memperkuat posisi Arab Saudi dimata negara – negara dunia. Sumber daya alam (SDA) seperti minyak bumi yang dimiliki negara – negara kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi membuat kawasan negara Arab Saudi dilirik negara lain. Minyak bumi sangat dibutuhkan oleh negara – negara tetangga khususnya negara industri. Sehingga menimbulkan kerja sama maupun konflik di Timur Tengah. Kemudian fluktuasi harga minyak yang tidak menentu juga mempengaruhi kestabilan perekonomian Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Sebagai sumber utama energi dunia, fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Hal ini juga sejalan dengan ketergantungan dunia atas minyak bumi sebagai sumber energi masih sangat besar. Kondisi krisis politik di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran bagi perekonomian global.

Dalam suatu tulisan memuat Arab Saudi dapat diperhitungkan sebagai negara ‘*super power*’ wilayah dan adidaya menengah (Buzan, 2004). Selain itu, Arab Saudi

terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Informasi yang didapat bahwa sumber daya alam berupa minyak yang dimiliki Arab Saudi memperkuat posisinya dimata dunia dan menjadi pendapatan utama negara Arab Saudi sekitar 70% penghasilan karna migas, tetapi hal ini pun berdampak kepada ketergantungan negara terhadap pendapatan di sektor migas. Inilah yang mendorong pemerintah Arab Saudi untuk mereformasi perekonomian negaranya agar tidak lagi bergantung di sektor migas dan tindakan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program *Saudi Vision*, dengan harapan program ini dapat membantu menjaga kestabilan perekonomian Arab Saudi dengan mengembangkan sektor layanan umum, seperti: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pariwisata.

Semenjak ‘Saudi Vision 2030’ disahkan, Arab Saudi mulai gencar melakukan tur kerajaan ke beberapa negara dalam rangka kampanye dan promosi program tersebut yang dipimpin langsung oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud. Tentunya setiap kebijakan tidak selalu dapat membuat senang semua pihak, pasti selau ada pihak yang kontra terhadap suatu kebijakan. Tak terkecuali ‘*Saudi Vision 2030*’, sekalipun menurut perspektif Pemerintah Arab Saudi ‘*Saudi Vision 2030*’ merupakan kebijakan visioner jangka panjang dengan harapan meminimalisir kemungkinan krisis pada masa yang akan datang dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Diiringi dengan perubahan kebijakan domestik yang kontroversial bagi Arab Saudi sendiri. Kritik pun datang dari tokoh-tokoh islam konservatif di lingkungan Arab Saudi karena masih belum menerima bahwa Arab Saudi akan menjadi negara yang lebih moderat, kritik juga datang dari sekutu dagang utama Arab Saudi yaitu Amerika Serikat, dengan diversifikasi ekonominya perusahaan minyak terbesar milik Amerika Serikat tidak menjadi prioritas lagi bagi Arab Saudi dan Amerika khawatir mulai kesulitan menjaga kepentingannya di Arab Saudi, dan kebijakan ini juga dipandang skeptis oleh dunia islam yang

khawatir Arab Saudi akan kehilangan identitasnya sebagai jantung dari negara Islam. Apakah program ini berpengaruh pada politik luar negeri Arab Saudi ?. Jika ternyata program ini berpengaruh pada perubahan interaksi Arab Saudi dalam hubungannya dengan dunia internasional, maka hal inilah yang menarik bagi penulis untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fakta dari latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

“Apa pengaruh program ‘Saudi Vision 2030’ terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi ?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut dan sebagai alat bantu analisis, maka penulis menggunakan beberapa kerangka pemikiran dan pendekatan sebagai berikut :

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam Analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Selain itu, konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri, yaitu untuk evaluasi (Masoed, 1990). Konsep Kepentingan Nasional merupakan konsep yang lahir dari paradigma/pendekatan realis oleh Hans J. Morgenthau. Konsep ini menjadi populer dalam ilmu hubungan internasional karena di populerkan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Ketika itu, AS selalu mendasarkan politik luar negerinya pada kepentingan nasional. Segala tindakan yang dilakukan oleh AS dalam kancah politik internasional selalu mengatasnamakan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara

yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada di negara tersebut. Kepentingan Nasional juga merupakan kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial), identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain.

Jika dikontekskan dengan studi kasus ini, jelas bahwa Arab Saudi berusaha untuk mempertahankan eksistensi rezim ekonomi. '*Saudi Vision*' yang dikembangkan oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Ini mencakup sejumlah tujuan dan strategi reformasi untuk kesuksesan ekonomi jangka panjang Kerajaan, termasuk pengurangan subsidi, penciptaan dana kekayaan negara, pembukaan Saudi Aramco untuk investasi swasta melalui IPO parsial, dan reformasi beberapa industri termasuk pariwisata dan pertahanan. Visi tersebut dibangun di sekitar tiga tema utama: masyarakat yang bersemangat, ekonomi yang berkembang, dan bangsa yang ambisius (Government of Saudi Arabia, 2016).

Untuk mencapai masyarakat yang dinamis, Arab Saudi akan fokus pada orang-orangnya dan keyakinan Islamnya. Hal tersebut akan terwujud melalui serangkaian komitmen, antara lain: meningkatkan jumlah pengunjung umrah dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun; mendirikan museum Islam terbesar di dunia; menggandakan jumlah situs warisan Saudi yang terdaftar di UNESCO; mempromosikan pertumbuhan peluang budaya dan hiburan di dalam Kerajaan; mendorong gaya hidup sehat agar jumlah warga yang berolahraga seminggu sekali meningkat dari 13 menjadi 40 persen; dan mengembangkan kota-kota Saudi sehingga tiga kota diakui dalam 100 kota dengan peringkat teratas di dunia.

Untuk mencapai ekonomi yang berkembang, Kerajaan akan mendiversifikasi ekonominya dan menciptakan peluang kerja

yang dinamis bagi warganya. Ini akan terjadi melalui komitmen terhadap pendidikan, kewirausahaan dan inovasi, termasuk: diversifikasi ekonomi bangsa melalui privatisasi aset milik negara yang sedang berlangsung, termasuk pembentukan dana kekayaan kedaulatan yang akan dibiayai melalui IPO parsial Saudi Aramco; membuka industri terbelakang seperti manufaktur, energi terbarukan dan pariwisata; memodernisasi kurikulum dan standar lembaga pendidikan Saudi dari masa kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Pada tahun 2030, Arab Saudi akan memiliki setidaknya lima universitas di antara 200 universitas terbaik di dunia; dan memfokuskan kembali pada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan mendorong bantuan keuangan. Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20 menjadi 35 persen pada tahun 2030.

Untuk menjadi negara yang ambisius, Arab Saudi akan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam strategi pemerintahannya. Keberhasilan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan fondasi yang kokoh. Untuk mewujudkan potensi ini, Kerajaan akan: menegakkan toleransi nol untuk semua tingkat korupsi; meningkatkan transparansi dengan memperluas layanan online dan meningkatkan standar tata kelola; membentuk Program King Salman untuk Pengembangan Modal Manusia untuk melatih lebih dari 500.000 pegawai pemerintah dalam praktik terbaik; dan mendukung sektor nirlaba melalui peningkatan efisiensi dan dampak.

Rencana *Vision 2030* adalah langkah pertama untuk mencapai aspirasi ekonomi Arab Saudi dan mengubah kehidupan warganya, tetap ingin mempertahankan dirinya sebagai jantung dari negara Islam dan juga ingin menjadi negara yang bisa menerima perbedaan. Berbeda dengan sebelumnya (sebelum program '*Saudi Vision 2030*'), Arab Saudi akan terus bergantung pada sektor migas yang mana hal tersebut juga bergantung pada harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia jatuh pada musim panas 2014, dimana Arab Saudi menghadapi salah satu tantangan ekonomi paling menakutkan

dalam sejarah modernnya. Kemudian Arab Saudi juga akan tetap dikenal sebagai negara yang intoleran terhadap perbedaan dan takut pada arus modernisasi dengan identitas rezim monarki yang konservatif.

2. Pendekatan Konstruktivis : Konsep Identitas

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme dengan konsep identitas. Secara ontologis, konstruktivis beranggapan apabila gagasan ataupun karakteristik seseorang menentukan peran dan tindakannya dalam kegiatan hubungan internasional. Konstruktivis juga menafsirkan kata anarki sebagai suatu hal yang saling berhubungan erat di antara aktor-aktor yang terlibat, dimana itu dihasilkan dari interaksi sosial. Aktor dapat melihat anarki tergantung bagaimana aktor tersebut melakukan subjektivitas terhadap aktor lain, dan sebaliknya. Sehingga anarki bisa mengalami banyak makna, entah dalam hal baik ataupun buruk. Dengan kata lain, anarki bukanlah hal alami melainkan proses subjektivitas dan sosial (Wendt, 1992, p. 414)

Konstruktivis mengutamakan tiga konsep yang mempengaruhi sebuah tindakan manusia dalam hubungan internasional, yaitu identitas, norma dan bahasa (Wendt, 1999). Konsep yang hendak ditekankan untuk penelitian ini adalah Konsep Identitas. Alexander Wendt memberikan definisi dari identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt, 1999, p. 224). Artinya, identitas dapat membentuk kepentingan aktor baik seseorang maupun negara, yang kemudian kepentingan itu membentuk tindakan yang nantinya secara tidak langsung juga akan membentuk identitas. Baik identitas yang sama atau berubah menjadi identitas baru.

Alexander Wendt juga membagi empat jenis identitas dalam hubungan internasional (Wendt, 1992). Pertama adalah identitas personal dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah seperti contohnya bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain-lain. Identitas kedua adalah identitas tipe

yang dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama.

Identitas ketiga adalah identitas peran yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional. Identitas ini baru bisa terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas hubungan internasional dengan aktor lain dan mendapat tanggapan. Jenis identitas ini memiliki hubungan dengan pembentukan identitas menjadi kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Holsti dalam jurnalnya *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Terbentuknya kebijakan luar negeri suatu aktor dipengaruhi oleh faktor internal (unsur negara, opini publik, dan lainnya) dan faktor eksternal (nilai dan norma internasional, opini dari aktor lainnya, dan lain-lain). Apabila digabungkan, selanjutnya akan terlihat apa posisi suatu aktor dan bagaimana aktor tadi seterusnya bertindak dalam hubungan internasional (Holsti, 1970, p. 245).

Identitas terakhir adalah identitas kelompok atau *collective identity*. Jenis identitas ini terbentuk ketika terdapat suatu kelompok yang berisikan kumpulan aktor negara saling berhubungan, dan pada akhirnya membentuk suatu identitas yang dimiliki secara bersamaan karena bergabung dengan kelompok tersebut. Hubungan antar aktor negara bisa terjadi karena saling ketergantungan atau karena rasa solidaritas yang tinggi. Wendt memaparkan tiga faktor yang membentuk identitas kolektif suatu aktor (Wendt, 1994). Pertama adalah faktor sistemik atau faktor interaksi antar negara. Faktor kedua adalah faktor struktural atau faktor intersubjektivitas antarnegara. Identitas kolektif kemudian baru terbentuk bila dua atau lebih negara sama-sama mengidentifikasi satu sama lain sebagai kawan. Faktor terakhir adalah faktor strategis atau faktor komunikasi antarnegara. Negara yang bersikap ramah pada negara lainnya tentu akan mendapat tanggapan positif dan timbulnya rasa solidaritas satu sama lain.

Identitas suatu aktor bisa pula berubah meskipun telah memegang suatu identitas dalam jangka waktu yang lama. Perubahan dari identitas bisa terjadi karena pemaknaan yang berbeda dari aktor lain, atau karena ada faktor internal (karakter dan gaya kepemimpinan elite pemerintah) dan eksternal (perubahan peristiwa atau lingkungan internasional) yang membuatnya berubah. Pada akhirnya, negara pun harus beradaptasi dengan bertransformasi identitas yang baru agar dapat diterima di kalangan internasional, dimana hal ini disebut sebagai krisis identitas

Suatu aktor juga bisa memiliki beberapa identitas secara sekaligus, tergantung dari situasi apa yang sedang dihadapi negara tersebut (Rosyidin, 2015, p. 60). Tetapi ketika aktor tersebut memiliki dua identitas atau lebih yang saling bertolak belakang ketika menghadapi situasi yang sama, hal ini kemudian disebut sebagai konflik identitas (*identity/role conflict*) (Hendropuspito, 1989, pp. 105-107). Pada umumnya, aktor tersebut dapat bernegosiasi dan memilih salah satu identitas yang lebih relevan dan penting dalam menghadapi situasi tersebut tanpa mengorbankan identitas yang lain. Namun apabila identitas yang saling bertolak belakang sama-sama memiliki cara atau solusi yang relevan dan penting dalam mengatasi situasi yang dihadapi sebelumnya, konflik identitas semakin sulit untuk dipecahkan kecuali aktor tersebut harus berkorban dengan menghilangkan salah satu identitas yang bertolak belakang dalam rangka menyelesaikan situasi yang dihadapi (Settles, Sellers, & Damas, 2002, pp. 575-576).

Dalam konteks Arab Saudi, ide reformasi yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) bisa ditanggapi sebagai perwujudan kekhawatiran kerajaan Saudi terhadap ladang perekonomian mereka. Minyak dan gas merupakan komoditi utama yang selama ini menopang negara tersebut tampak semakin tak bersahabat. Harga minyak semakin melemah dan persaingan ekonomi internasional semakin meningkat. "Kecanduan" Saudi terhadap minyak bahkan bisa saja menjadi malapetaka bagi mereka bila tidak ada langkah

yang brilian untuk mengantisipasi. Data yang dirilis oleh Badan Moneter Internasional menyebutkan pertumbuhan perekonomian Saudi anjlok menjadi 0,4%. Ditambah lagi adanya peningkatan produksi minyak di AS yang mendorong acuan harga West Texas Intermediate (WTI) kembali ke bawah 50 dollar AS per barrel. Dan kondisi diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2018 (kompas.com).

Kemudian teretuslah rencana besar “Visi Ekonomi 2030” untuk mentransformasi perekonomian Saudi lebih baik dan menggiring Saudi ke arah yang lebih modern, moderat, dan terbuka pada dunia. Pengembangan dan diversifikasi sektor non-minyak menjadi target utama Saudi. Salah satunya pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata. Bahkan MBS juga telah mengumumkan Saudi akan membangun sebuah lokasi wisata kelas dunia di kawasan Laut Merah lengkap dengan berbagai fasilitas modern, canggih, dan kaum hawa di pantai dibolehkan memakai bikini (middleeasteye.net).

Visi Saudi 2030 tersebut juga menghendaki perombakan sektor sosial dan budaya sebagai bagian kesatuan negara. Saudi pun menunjukkan keterbukaannya dengan mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan memasuki stadion. Singkatnya, reformasi ekonomi mewajibkan adanya reformasi sosial. Di antara terobosan reformasi sosial –selain ruang publik bagi perempuan- yang diinisiasi oleh pihak kerajaan adalah pemberian lisensi bagi industri bioskop untuk beroperasi yang direalisasi pada Mei 2018. Berkenaan dengan ini, Menteri Kebudayaan dan Informasi, Dr. Awwad Alawwad mengatakan, “Langkah ini hadir sebagai bagian dari agenda reformasi sosial dan ekonomi dalam bingkai “Visi 2030” di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Keputusan untuk mengizinkan bioskop adalah inti program pemerintah untuk mendorong dan mengapresiasi budaya lokal yang terbuka serta memperkaya kebudayaan masyarakat Saudi” (RiyadhConnect.com).

Satu hal yang pasti, apapun agenda yang digaungkan MBS adalah upaya untuk mereduksi pelabelan konservatif dan fundamentalis oleh dunia internasional selama ini, dan kemudian direvisi dengan menampilkan Saudi yang inklusif.

3. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional adalah teori yang membahas perihal penyebab suatu fenomena terjadi dengan kata lain aktor yang membuat kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan, pemikiran, dan variabel lainnya. Aktor yang dimaksud adalah negara yang tentu saja berhubungan dengan bagaimana negara tersebut bertahan sekaligus menjamin kesejahteraan rakyatnya (Coleman, 1989). Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh James S. Coleman, yang mengatakan bahwa dalam proses kebijakan luar negeri sumber yang berperan adalah aktor dan sumber daya. Artinya aktor berperan mengelola dan mencari sumber daya yang dimiliki. Namun menurut Coleman, aktor yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang disebut sebagai pemerintah yang menjadi aktor dalam pembuat keputusan untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga untuk mendapatkan rasionalitas dari tindakan atau kebijakan suatu negara dapat dilakukan dengan menafsirkan keputusan berdasarkan pada kejadian yang berkaitan dengan negara tersebut. Dalam teori pilihan rasional, pertimbangan pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan pertimbangan keuntungan maksimal yang dapat didapatkan. Apabila individu dan kelompok yang menjalankan pemerintahan mampu mendapatkan kepentingannya, maka hal tersebut berlaku pula bagi negara. Karena pada hakikatnya, negara dijalankan oleh individu dan kelompok yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan.

Posisi negara dalam teori pilihan rasional dalam konteks hubungan internasional adalah negara sebagai aktor utama. Pada hakikatnya negara adalah sebuah kesatuan kelompok yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi yang bersifat ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Artinya pemimpin organisasi atau pejabat politik membuat keputusan

atas negara adalah keputusan atas nama kelompok yang selanjutnya menjadi kebijakan negara. Mereka adalah aktor yang segala keputusannya dikeluarkan menjadi atas nama negara. Dengan demikian, presiden, menteri dan pejabat lainnya membuat dan melaksanakan keputusan tentu saja atas nama negara. Dalam konteks tersebut, negara dipandang memiliki sikap dalam membuat keputusan atau kebijakannya. Keputusan yang diambil adalah cerminan dari sikap negara. Dalam Rational Model, negara adalah aktor satu-satunya yang membuat kebijakan. Terdapat tiga komponen dalam pengambilan keputusan melalui model rasional ini yaitu tujuan, pilihan, dan konsekuensi. Faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah ekonomi politik. (Coleman, 1990)

“Ada tiga kriteria suatu keputusan dianggap sebagai keputusan yang rasional. Pertama, landasan aktor untuk membuat kebijakan adalah kepentingan nasional atau tujuan dari negaranya. Kedua adalah jika terdapat beberapa pilihan, maka pembuat kebijakan harus mampu memilih pilihan tersebut berdasarkan keuntungan sekaligus konsisten terhadap pilihannya. Ketiga, adalah mampu memaksimalkan pilihan yang telah dipilih sehingga keuntungan yang didapat mampu dimaksimalkan pula.” (Coleman, 1990)

Dalam kasus ini Arab Saudi dengan situasi ekonominya yang mengkhawatirkan, maka opsi reformasi di sektor sosial dan ekonomi pun digagas. Beberapa langkah reformasi yang dirumuskan di antaranya, membuka sektor pariwisata, pemerataan hukum lewat penindakan terhadap pelaku korupsi, menekan potensi ekstremisme oleh para ulama⁴, melonggarkan peraturan terhadap peran perempuan, dan lain-lain. Di antara beberapa kebijakan yang telah diupayakan Saudi, terlihat jelas bahwa mereka sangat mengedepankan *rational-approach*. Dengan menekankan pada keputusan yang berkaitan dengan daya guna (Syamsi, 2000, pp. 319-321). Juga terlihat kebijakan Saudi tersebut lebih bersifat objektif.

Selain itu menurut buku yang dituliskan oleh Friedman, Pilihan Rasional merupakan sikap individu yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan dalam membuat keputusan agar mendapatkan hasil maksimal. “... *an individual acts as if balancing cost against benefits to arrive at action that maximizes personal advantage*” (Ogu, n.d.). Kebijakan yang dikeluarkan sebagai pilihan rasional memiliki beberapa komponen didalamnya, diantaranya adalah tujuan atau sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan (Allison, 1968). Tujuan dan sasaran utama dari pilihan rasional di sini adalah kepentingan nasional. Oleh sebab itu, alternatif yang diajukan dalam pengambilan kebijakan adalah beragam dan juga dengan mempertimbangkan konsekuensi positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan. Suatu pilihan atau kebijakan rasional merupakan *value maximizing*. Jadi, aktor rasional, dalam hal ini decision maker, memilih alternatif dengan hasil tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya (Paramita, 2009).

Tabel 1. Pertimbangan Keuntungan dan Kerugian ‘SAUDI VISION 2030’

Keuntungan	Kerugian
<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan program diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor layanan publik yang bisa memperluas aliran pendapatan nasional. - Peluang kerjasama ekonomi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya konflik di internal Pemerintahan Arab Saudi oleh tokoh Islam Konservatif. - Dengan tidak bergantungnya Arab Saudi terhadap minyak maka berpotensi merenggangnya hubungan Arab

<p>investasi serta penguatan hubungan bilateral menjadi terbuka lebar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan label konservatif dengan membawa Arab Saudi ke arah moderatisasi. - Memperkuat pengaruh Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah sebagai jantung dari negara Islam. 	<p>Saudi dengan Amerika Serikat.</p>
--	--------------------------------------

Dalam konteks Arab Saudi sejauh ini, belum terlihat keputusan- keputusan dibuat bersifat kognitif, karena secara eksplisit hasil final (output) reformasi Saudi ini masih belum jelas substansi dan haluannya. Menurut J. Reason, setiap pengambilan keputusan mesti menunjukkan artikulasi pemilihan satu jalur keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia (Reason, 1990, p. ix). Hanya saja, Saudi berangkat dari keresahan terhadap sektor minyak sebagai latar belakang reformasi, sehingga membuka peluang reformasi bagi sektor lainnya, terutama sektor budaya dan agama.

Atas dasar *economic interest* Saudi tersebut, proses perancangan kebijakan terpolarisasi ke aspek *ideological interest*, dan Wahabisme adalah tumbalnya. Meski ini cukup riskan bagi Saudi, tapi penyelamatan kepentingan nasional secara global tampaknya lebih diutamakan. Dengan kata lain, kebutuhan atau ketergantungan Saudi terhadap elite-elite internasional dipandang masih cukup besar. Ikhtiar reformasi yang sudah semestinya ditentukan oleh nilai-nilai ideal yang

dicita-citakan oleh rakyat. Karena reformasi sendiri berangkat dari pemenuhan aspirasi rakyat.

Berangkat dari beberapa pemaparan di atas, secara eksplisit sejauh ini Saudi sudah menunjukkan langkah-langkah reformasi mereka, tinggal lagi indikator keberhasilannya masih perlu dipertanyakan dan ditinjau ulang. Cita-cita reformasi ini apakah sejalan dengan kultur dan aspirasi masyarakat Saudi sendiri, karena Saudi sebagai negara yang mendudukkan kebijakan pemerintah sebagai keputusan mutlak dan tak dapat ditolerir.

D. Hipotesa

Dari rumusan masalah dan kerangka teori yang di gunakan, maka dugaan sementara penulis terkait fenomena tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan semangat reformasi ekonomi melalui program '*Saudi Vision 2030*' ini, Arab Saudi ingin dipandang sebagai negara yang lebih moderat
2. Memperkuat hubungan diplomatik dengan negara non-Arab
3. Mempunyai kebijakan negara yang lebih terbuka dalam menerima investasi asing
4. Politik luar negeri Arab Saudi setelah mengadopsi '*Saudi Vision*' menjadi lebih dinamis. Perubahan politik luar negeri Arab Saudi ini merupakan kebijakan yang rasional.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian yang ditetapkan penulis untuk menetapkan penggunaan batas waktu dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut; dimulai pada tahun 2014 dimana harga minyak dunia merosot paling tajam dalam sejarah. Lalu pada tahun 2016 program '*Saudi Vision 2030*' diresmikan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai respon atas anjloknya harga minyak dunia yang kemudian mulai diterapkan dan dikampanyekan. Hingga tahun 2019 sebagai data perkembangan terakhir dari eksekusi program '*Saudi Vision*

2030' yang berdampak pada perubahan politik luar negeri Arab Saudi. Maka dari itu, penulis menetapkan 2014 – 2019 sebagai periode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

F. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang hendak mencari fakta berdasarkan pada interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana Program '*Saudi Vision 2030*' berpengaruh pada Politik Luar Negeri Arab Saudi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, dalam penelitian ini digunakan teknik penelaahan terhadap dokumen tertulis (kepustakaan) meliputi pencarian data dari buku-buku, jurnal, koran, serta sumber-sumber yang valid dan kredibel yang berhubungan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penggunaan data yang dipilih oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat dokumen atau orang lain. Data yang akan penulis gunakan di dapatkan dari buku-buku, surat kabar, maupun situs media online kemudian akan ditampilkan dalam bentuk uraian lalu dianalisis kemudian dieksplorasi secara mendalam,

selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi kali ini, penulis melakukan pembagian bab-bab dengan pembahasan-pembahasannya sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori yang penulis gunakan, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi dan Sistematika Penulisan.

BAB II, membahas tentang profil '*Saudi Vision 2030*'.

BAB III, membahas tentang pengaruh *Saudi Vision 2030* terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi.

BAB IV, Penutup dengan kesimpulan penulis dari semua pembahasan dan menyampaikan hasil analisis dari *research question*.